

TARGET DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA

Mandala Harefa dan Burhanudin Mukhamad Faturahman

Abstrak

Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua memiliki tantangan perekonomian cukup besar, baik nasional maupun global. Pada periode pertamanya, target pertumbuhan ekonomi 7% belum tercapai, selain itu perang dagang AS-China berdampak pada penurunan investasi sejak 2018. Periode kedua ini merupakan masa krusial untuk menyelesaikan masalah perekonomian sekaligus menghadapi tantangan guna mencapai tingkat PDB setingkat negara maju pada tahun 2045. Tulisan ini membahas target dan tantangan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua harus mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dan harus beranjak dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Dalam menghadapi tantangan perekonomian tersebut, DPR RI harus mendukung dan mendorong kinerja pemerintah, paling tidak dalam jangka pendek memastikan program yang telah berjalan tahun 2019 dan APBN Tahun 2020.

Pendahuluan

Seusai pelantikan, Pemerintahan Jokowi periode kedua memiliki beberapa target untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tujuan target tersebut adalah mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*) pada tahun 2045. Dengan meletakkan fondasi yang kuat dalam 5 tahun pemerintahan periode kedua, diharapkan Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan pendapatan \pm Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Pada tahun 2045, Produk Domestik Bruto

Indonesia (PDB) mencapai USD7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar perekonomian dunia dengan kemiskinan mendekati 0% (*Kompas*, 21 Oktober 2019).

Dalam Pidato Presiden pada Sidang Paripurna tanggal 20 Oktober 2019 disampaikan bahwa untuk mewujudkan target di atas dibutuhkan kerja keras. Sebab, apa yang diinginkan tidak datang dengan sendirinya dan tidaklah mudah. Dalam dunia yang penuh risiko dan sangat dinamis serta kompetitif, tentunya pemerintahan Jokowi periode kedua harus terus mengembangkan



cara-cara baru dan nilai-nilai baru. Presiden Jokowi meminta agar jajaran pemerintahan tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton, namun menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas baru lima tahun ke depan.

Dalam penguatan fondasi perekonomian, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan pada periode pertama (2014-2019), menjadi sebuah keharusan untuk segera direalisasikan demi menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan publik. Survei litbang Kompas tentang tingkat kepuasan kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang relatif baik (58,8%). Angka tersebut mengalami penurunan sedikit dibandingkan bulan Januari 2019 sebesar 65,1% (nasional.kompas.com, 18 Oktober 2019).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi periode kedua adalah menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat Indonesia saat ini masih belum beranjak dari *middle income trap* sebesar 5,17% tahun 2018 (tirto.id, 20 Oktober 2019). Bahkan pada awal kinerja Pemerintahan Jokowi periode pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tumbuh 4,79%, melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02% di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,06% (bps.go.id, 24 Oktober 2019).

Persoalan lainnya adalah bagaimana menggairahkan perekonomian Indonesia, yaitu upaya untuk meningkatkan investasi di tengah perang dagang AS-China hingga langkah penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi (debirokratisasi perijinan). Dalam jangka pendek penyesuaian program pemerintah yang sedang berjalan dalam APBN 2019, dan bersiap-siap menjalankan program APBN 2020 dilakukan tanpa masa penyesuaian yang lama. Dalam waktu singkat, pihaknya harus fokus kerja dalam jangka pendek dengan mendorong kementerian

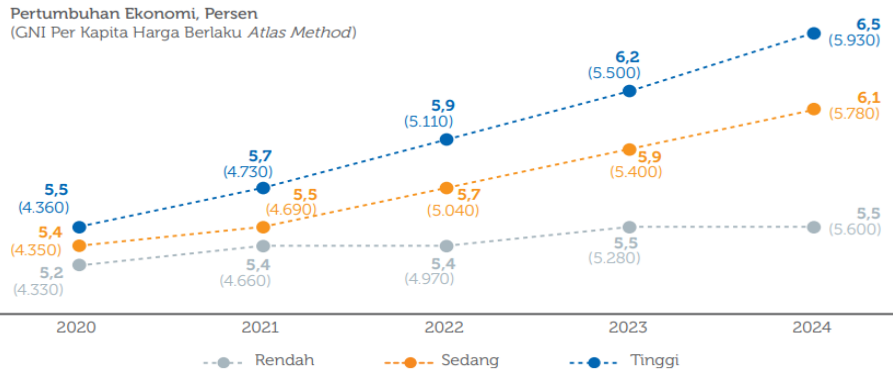
dan lembaga melewati masa transisi pemerintahan secepat mungkin (*Neraca*, 2 November 2019). Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas target dan tantangan perekonomian nasional Kabinet Indonesia Maju.

Target Perekonomian Nasional

Sebagai tahap awal berbagai target kebijakan yang sudah dicanangkan dalam APBN Tahun 2019 harus dapat dioptimalkan agar tidak menjadi kontra-siklus untuk menahan perlambatan pertumbuhan perekonomian. Adapun pemerintah memiliki perkiraan (*outlook*) pertumbuhan perekonomian tahun 2019 mencapai 5,1% secara tahunan (*year on year/yoy*), walaupun kinerja ekspor dan investasi belum sesuai harapan sepanjang tahun 2019. Pada Kuartal II 2019, perekonomian Indonesia baru tumbuh 5,05% (*yoy*). Sedangkan pada Kuartal III 2019, realisasi pertumbuhan perekonomian diprediksi sebesar 5,05%. Artinya, perekonomian dalam negeri bergerak stagnan dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya yang juga tumbuh 5,05%.

Untuk mempertahankan perekonomian pada kisaran 5,05%, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap di atas 5%, karena mayoritas sumber pertumbuhan perekonomian dalam negeri masih ditopang oleh konsumsi. Hal ini didukung data BPS yang menunjukkan sebanyak 55,79% pembentukan pertumbuhan perekonomian berasal dari konsumsi pada Kuartal II 2019. Penyumbang kedua terbesar berasal dari investasi sebesar 31,25% (*neraca.co.id*, 4 November 2019). Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.

Untuk mempertahankan pertumbuhan rata-rata investasi berada di atas 5%, pemerintah perlu memperhatikan tantangan eksternal dalam menjaga perekonomian di



Sumber: Bappenas.go.id, 14 Agustus 2019.

Gambar 1. Potential Growth, Tahun 2020-2024

dalam negeri di mana pelemahan perekonomian dunia diproyeksi berada pada level 3% hingga akhir tahun 2019. Proyeksi tersebut telah berubah beberapa kali dari mulai berada di level 3,9%. Oleh karena itu, menteri-menteri baru perlu segera mempelajari program pemerintah sesuai APBN 2019 (finance.detik.com, 4 November 2019).

Sedangkan target jangka panjang menjadikan PDB Indonesia pada tahun 2045 menjadi USD7 triliun dengan kemiskinan mendekati 0% harus dimulai pada tahun ini. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41% atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82%. Dengan rincian sebesar 25,14 juta penduduk berada pada garis kemiskinan, angka ini menurun 810.000 penduduk dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebesar Rp425.250 per bulan per kapita sebagai garis kemiskinan terbaru. Indikator ini meningkat dari Maret 2018, di mana garis kemiskinan dipatok Rp401.220 per bulan per kapita (cnnindonesia.com, 15 Juli 2019).

Tantangan Perekonomian yang Dihadapi

Tantangan Kabinet Indonesia Maju bidang perekonomian cukup berat dengan ancaman resesi perekonomian global. Berlarut-larutnya perang dagang Amerika Serikat (AS)-China memberikan dampak bagi perekonomian global terutama bagi Indonesia dengan menurunnya jumlah ekspor Indonesia. AS dan China masing-masing menaikkan tarif impor barang masuk, terutama minyak mentah untuk AS sebesar 5% dan barang-barang elektronik bagi China sebesar 15%. Perlambatan perekonomian global menyebabkan harga dan permintaan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia semakin turun. Adapun manfaat yang diperoleh dari perang dagang tersebut bersifat jangka pendek sedangkan jangka panjang tidak memberikan manfaat sama sekali (liputan6.com, 6 Oktober 2019).

Salah satu strategi untuk menghadapi perang dagang AS-China dan perlambatan perekonomian global adalah *pertama*, pemerintah harus fokus mengelola permintaan (konsumsi) dalam negeri. Cara ini mampu meminimalisasi dampak dari pengaruh perekonomian eksternal. Sementara itu, relokasi

investor asing dari Indonesia ke negara Asia Tenggara lain, terutama Vietnam, Malaysia, dan Thailand, merupakan satu dari sejumlah tantangan perekonomian yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Investasi yang keluar dari Indonesia mengakibatkan pengangguran meningkat dan konsumsi rumah tangga menurun, seperti kasus PT. Foster Electronic yang pindah ke Myanmar dengan melepas sekitar 1.000 karyawan, yang berimbas pada melambannya pertumbuhan ekonomi (bbc.com, 18 Oktober 2019).

Kedua, peningkatan daya saing industri manufaktur. Daya saing Indonesia merosot lima peringkat ke posisi 50, dari 141 negara di dunia berdasarkan laporan yang disusun Forum Perekonomian Dunia (WEF). Peringkat Indonesia relatif lebih bagus dari Vietnam yang duduk di posisi 67, namun Vietnam melesat 10 peringkat dibanding tahun lalu. Di Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand, namun unggul dari Filipina (bbc.com, 18 Oktober 2019).

Indonesia perlu belajar dari pengalaman Vietnam yang mampu memanfaatkan momen perang dagang AS-China melalui efektivitas birokrasi. Kebijakan dari pusat yang ditetapkan dengan efektif dan tersalurkan ke daerah di tengah tidak ramahnya

kebijakan impor pada pengusaha dan sulitnya akuisisi membuat lahan di China. Iklim tidak kondusif tersebut membuat perusahaan menghindari kenaikan tarif akibat perang dagang dengan AS dan lebih memilih berlabuh di Vietnam.

Ketiga, meningkatkan kemudahan berbisnis juga menjadi tantangan bagi Pemerintahan Jokowi periode kedua. Kebijakan deregulasi sejumlah 16 paket yang diterbitkan Jokowi berisi tentang kemudahan layanan investasi tiga jam, perluasan *tax allowance* dan *tax holiday*, insentif untuk Kawasan Perekonomian Khusus (KEK), relaksasi daftar negatif investasi, penerapan *sistem online single submission* untuk mempermudah izin usaha, dan lain-lain diharapkan dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp850 triliun dan dari target ini sekitar 50-55% diharapkan FDI sebagai kontributornya.

Keempat, tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah ancaman utang luar negeri yang terus bertambah, termasuk utang luar negeri swasta. Secara keseluruhan terdapat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp4.197 triliun yang sebagian dapat dibiayai dari utang. Pembangunan infrastruktur ke depan juga turut meningkatkan utang Indonesia. Tahun 2014, utang

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK

Keterangan	Target	Realisasi
1. Pertumbuhan ekonomi (<i>Growth</i>)	7%	5,2%
2. <i>Competitiveness Index</i> (GCI)	45 pada tahun 2018	50 pada tahun 2019
3. <i>Ease of doing business</i>	Peringkat 72	Peringkat 73
4. Rasio utang	27,43% dari PDB 2015	29,98% dari PDB 2018
5. Konektivitas antar wilayah Indonesia	-	245 PSN, dengan biaya Rp4.197 Triliun
6. Industri manufaktur	8%	4,07%

Sumber: BBC News Indonesia, 18 Oktober 2019.

Indonesia tercatat sebesar Rp3.165 triliun atau 27,43% dari PDB. Rasio utang atas PDB ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir, mencapai Rp4.418 triliun atau 29,98% dari PDB tahun 2018 (bbc.com, 18 Oktober 2019). Dengan besarnya nominal proyek infrastruktur tersebut, perlu diperhatikan terkait utilitas, perencanaan, dan keandalannya yang komprehensif sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah. Untuk mewujudkannya maka DPR RI melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan perlu merumuskan kebijakan perekonomian nasional yang mengarah pada asas kebermanfaatannya bagi masyarakat luas serta turut mengawasi proses pembangunan itu sendiri sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Penutup

Dengan merujuk pidato pelantikan Presiden Jokowi periode kedua terdapat empat pilar pembangunan sebagai tahapan dan prasyarat yang harus dilalui pada lima tahun krusial oleh Indonesia, dimana yang harus disiapkan antara lain: (a) pembangunan manusia (SDM) serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) pembangunan perekonomian berkelanjutan; (c) pemerataan pembangunan; serta (d) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian Pemerintahan Jokowi periode kedua 5 tahun ke depan menjadi periode krusial sebagai penyusun fondasi perekonomian untuk mencapai target tersebut.

Dalam upaya mengantisipasi dan tantangan perekonomian dunia ke depan yang sangat tidak pasti, maka kondisi ini harus direspons segera, utamanya melalui kerja kabinet untuk menopang perekonomian Indonesia. Pemerintah harus mampu mengembangkan kebijakan perekonomian yang inovatif di tengah kondisi perekonomian yang stagnan. DPR RI memiliki peran penting

dalam menghadapi tantangan dan pencapaian perekonomian terutama dalam pengawasan program-program pembangunan 5 tahun ke depan melalui realisasi anggaran, penyempurnaan regulasi, dan debirokratisasi perijinan untuk investasi.

Referensi

- "Ancaman Global, Kabinet Tancap Gas", *Neraca*, 2 November 2019, hal.1.
- "Anggota Baru Komisi XI Dengarkan Wejangan Sri Mulyani Soal Perekonomian Dunia", <https://finance.detik.com/berita-perekonomian-bisnis/d-4771456/>, diakses 5 November 2019.
- "Bersama Menuju Indonesia Maju", *Kompas*, 21 Oktober 2019, hal.1.
- "Jumlah Penduduk Miskin RI Maret 2019 Turun Jadi 25,14 Juta", <https://www.cnnindonesia.com/perekonomian/20190715132823-532-412205/>, diakses 24 Oktober 2019.
- "Perang Dagang AS China Memanas, Dampak ke Indonesia?", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4079841/>, diakses 24 Oktober 2019.
- "Perekonomian Bergerak Stagnan, Pertumbuhan Kuartal III Hanya 5,05%", <http://www.neraca.co.id/article/123904/>, diakses 5 November 2019.
- "Perekonomian Indonesia Triwulan IV 2015 Tumbuh 5,04% Tertinggi Selama Tahun 2015", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2016/02/05/1267/>, diakses 24 Oktober 2019.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, 20 Oktober 2019.
- "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024", https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/narasi_persen20RPJMN_persen20IV

persen2020-2024_Revisi persen2014 persen20Agustus persen202019.pdf, diakses 5 November 2019.

“Survei Litbang Kompas: 58,8% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/15412231/>, diakses 24 Oktober 2019.

“Tanggapi Pidato Jokowi, Sandiaga: Target-targetnya Cukup Tinggi”,

<https://tirto.id/tanggapi-pidato-jokowi-sandiaga-target-targetnya-cukup-tinggi-ej6z>, diakses 21 Oktober 2019.

“Tantangan Perekonomian Jokowi 2019-2024: Dari Investor Henggang, Daya Saing Lemah, Hingga Utang Yang Membengkak”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50097558>, diakses 21 Oktober 2019.



Mandala Harefa
manhar@dpr.go.id

Mandala Harefa, adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Ekonomi dan Kebijakan publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas melakukan kajian substansi terkait isu-isu kebijakan ekonomi makro, regional, keuangan daerah serta desentralisasi fiskal. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku dan bagian buku serta terbitan majalah populer dan surat kabar.

Burhanudin Mukhamad Faturahman, adalah Peneliti Pertama Bidang Ekonomi dan Kebijakan publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang dan Studi S1 Administrasi Publik Tahun 2015 di Universitas Brawijaya.. Tertarik pada penelitian bidang Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan.



Burhanudin Mukhamad Faturahman
burhanudin.faturahman@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.